

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

OPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III/IV	:	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL/Seksi Pengelolaan DAS
Program	:	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
Kegiatan	:	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Kab/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS
Hasil (Outcome)	:	Terlaksananya Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Dengan Baik
Keluaran (Output)	:	Jumlah Lembaga yang dikembangkan
Volume	:	2 Lembaga

Padang, Januari 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) TAHUN 2023

OPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III/IV	:	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL/Seksi Pengelolaan DAS
Program	:	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
Kegiatan	:	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS
Hasil (Outcome)	:	Terlaksananya Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Dengan Baik
Keluaran (Output)	:	Jumlah Lembaga yang dikembangkan
Volume	:	2 Lembaga

A. LATAR BELAKANG

Daerah Aliran Sungai (DAS) dapat dipandang sebagai sistem alami yang menjadi tempat berlangsungnya proses-proses biofisik hidrologis maupun kegiatan sosial-ekonomi masyarakat yang kompleks. Proses-proses biofisik hidrologis DAS merupakan proses alami sebagai bagian dari suatu daur hidrologi atau yang dikenal sebagai siklus air. Sedang kegiatan sosial-ekonomi masyarakat merupakan bentuk intervensi manusia terhadap sistem alami DAS, seperti pengembangan perkotaan, pembuatan bangunan air, pengembangan lahan kawasan lindung dan budidaya. Hal ini tidak lepas dari semakin meningkatnya tuntutan atas sumber daya alam (air, tanah, dan hutan) yang menyebabkan meningkatnya tekanan penduduk terhadap lahan yang membawa akibat pada perubahan kondisi daya dukung DAS.

Daerah Aliran Sungai (DAS) bukan hanya sungai tetapi mencakup wilayah daratan di atas badan sungai yang batasnya di daratan berupa pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan. Seluruh daratan terbagi habis dalam DAS dan semua orang hidup di dalam DAS. Untuk itu DAS perlu dilindungi dan diurus dengan sebaik-baiknya

serta wajib dikembangkan dan didayagunakan secara optimal dan berkelanjutan melalui upaya pengelolaan DAS sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Kemampuan DAS dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan manusia yang berada di dalam DAS pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, pada periode waktu tertentu, antara lain adalah kemampuan lingkungannya untuk menerima masukan materi biotik dan abiotik dari luar lingkungan DAS tersebut tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Dengan demikian pengelolaan DAS harus dilakukan secara holistik, terencana dan berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Perubahan kondisi daya dukung DAS sebagai dampak pemanfaatan lahan yang tidak terkendali tanpa memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air dapat mengakibatkan peningkatan erosi dan sedimentasi, penurunan penutupan vegetasi, dan percepatan degradasi lahan. Hasil akhir perubahan ini tidak hanya berdampak nyata secara biofisik berupa peningkatan luas lahan kritis, penurunan kuantitas, kualitas dan kontinuitas aliran, namun juga secara sosial ekonomi menyebabkan masyarakat menjadi semakin kehilangan kemampuan untuk berusaha di lahannya dan penurunan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan DAS bertujuan untuk mewujudkan kesadaran, kemampuan dan partisipasi aktif lembaga terkait dan masyarakat dalam pengelolaan DAS yang lebih baik, mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS secara berkelanjutan, mewujudkan kuantitas, kualitas dan keberlanjutan ketersediaan air yang optimal menurut ruang dan waktu dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendapatkan masukan dan kontrol terhadap pengelolaan DAS, diperlukan input-input yang membangun dari pihak yang berkompeten dalam hal pengelolaan DAS. Peran lembaga-lembaga pengelola DAS dalam hal ini sangat dibutuhkan, seperti Forum Pengelolaan DAS.

Saat ini di Provinsi Sumatera Barat baru terbentuk Forum Pengelolaan DAS Provinsi Sumatera Barat dan Forum Pengelolaan DAS Kota Padang. Untuk kedepannya diharapkan akan terbentuk Forum Pengelolaan Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan Fasilitasi Forum Pengelolaan DAS perlu disupport dari intansi lain seperti instansi pusat di daerah (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai), instansi daerah (Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta instansi terkait lainnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini adalah :

1. Melakukan pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS sehingga support dan dukungan dari kepedulian berbagai pihak di Kab/Kota, Provinsi dan Pusat dapat berkontribusi dalam memberikan masukan dan pertimbangan bagi kebaikan Pelaksana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
2. Mendapatkan informasi pengelolaan DAS dari beberapa aspek sebagai dasar perencanaan pengelolaan DAS

Tujuannya Kegiatan ini adalah terpantauanya kinerja pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Kab/Kota dalam Provinsi Sumatera Barat

C. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2014 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207) tanggal 30 Desember 2022;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40) tanggal 30 Desember 2022.

D. METODA PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, pada Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS berupa :

1. Fasilitasi terhadap forum Pengelolaan DAS Sumatera Barat, untuk pelaksanaan pertemuan/rapat dan peninjauan lapangan terhadap lokasi yang akan dikaji.
2. Koordinasi dalam rangka pembentukan Forum Pengelolaan DAS Kabupaten/Kota.

E. KELUARAN

Jumlah Lembaga Pengelolaan DAS yang dikembangkan (2 Lembaga).

F. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

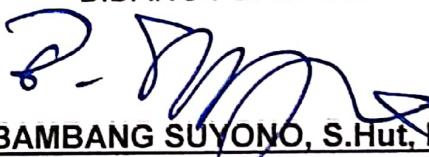
Jadwal pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS Tahun 2023 dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

G. PEMBIAYAAN

Kegiatan dibiayai melalui APBD Provinsi Sumatera Barat dari DBH Sumber Daya Alam Kehutanan – Dana Reboisasi (DR) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS dengan pagu dana sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Padang, Januari 2023

✓ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIDANG PDAS RHL


BAMBANG SUYONO, S.Hut, MM.

NIP 19720907 199903 1 002

Lampiran :

**Jadwal Kegiatan
Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS Tahun 2023**

NO	URAIAN	PELAKSANAAN										KET	
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	PERSIAPAN												
1)	Administrasi (Pembuatan SK, dll)												
2)	Koordinasi dengan stakeholder dan pihak terkait												
2	PELAKSANAAN KEGIATAN												
1)	Rapat Pendahuluan/Awal												
2)	Fasilitasi Perjalanan Dinas Forum DAS dalam Provinsi												
3)	Fasilitasi Forum DAS dalam untuk pembahasan/kajian DAS (rapat/pertemuan)												
4)	Fasilitasi Perjalanan Dinas Forum DAS ke luar Provinsi Sumatera Barat												
4	PELAPORAN AKHIR												

Padang, Januari 2023

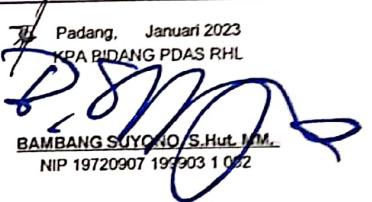
**PUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIDANG PDAS RHL**


BAMBANG SUYONO, S.Hut, MM.
NIP 19720907 199903 1 002

Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS

KODE REKENING				URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
					VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	
1				2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5				BELANJA DAERAH				100.000.000
5 1	02			BELANJA OPERASI				100.000.000
5 1	02			BELANJA BARANG DAN JASA				100.000.000
5 1	02	01		Belanja Barang				13.040.000
5 1	02	01	01	Belanja Bahan Pakai Habis				13.040.000
5 1	02	01	01	0004 Belanja Bahan Bakar Minyak				3.529.000
				BBM (Pertamax)	150	Liter	12.750	1.912.500
				BBM (Dexlite)	122	Liter	13.250	1.616.500
5 1	02	01	01	0024 Belanja Alat /Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				389.100
				- Binder clip 111	4	Kotak	4.800	19.200
				- Binder clip 107	7	Kotak	3.100	21.700
				- Pena 0,5 mm	2	Kotak	25.000	52.000
				- Spring File	10	Buah	6.900	69.000
				- Stop Map	1	Kotak	209.800	209.800
				- Trigonal Clip	3	Kotak	5.800	17.400
5 1	02	01	01	0025 Belanja Alat /Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover				521.600
				- Amplop polos (229x110 mm 80grm)	2	Kotak	25.800	51.600
				- Kertas A4 70 gram	10	rim	47.000	470.000
5 1	02	01	01	0026 Belanja Alat /Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak				3.168.500
				Cetak dan Penggandaan				3.168.500
				- Penggandaan Dokumen (Fotocopy)	4.446	lembar	250	1.111.500
				- Cetak peta Kabian DAS	24	lembar	77.000	1.848.000
				- Penjilidan Laporan Akhir Kegiatan (Spiral besi)	3	Eksemplar	23.000	69.000
				- Penjilidan Laporan Forum DAS (Hardcover Full Colour)	4	Eksemplar	35.000	140.000
5 1	02	01	01	0029 Belanja Alat /Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer				1.271.800
				- Catridge printer 810	1	Unit	224.000	224.000
				- Hardisk Eksternal 1 TB-black	1	Buah	850.000	850.000
				- Flashdisk 32 GB	1	Buah	85.900	85.900
				- Tinta printer (calour for cannon printer Inkjet BP-C41W)	3	Unit	37.300	111.900
5 1	02	01	01	0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat				4.160.000
				- Makan	80	Kotak	31.000	2.480.000
				- Snack	80	Kotak	21.000	1.680.000
5 1	02	02		Belanja Jasa				33.280.000
5 1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor				13.000.000
5 1	02	02	01	0003 Belanja Jasa Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia				13.000.000
				- Jasa Moderator (Non Profesional)	2	orang	700.000	1.400.000
				- Narasumber profesional	4	jam	1.700.000	6.800.000
				- Narasumber (Eselon II)	4	jam	1.000.000	4.000.000
				- Pembawa Acara/MC	2	orang	400.000	800.000
5 1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan				15.000.000
5 1	02	02	06	Belanja Sewa Hotel				15.000.000
				- Biaya Pertemuan Fullboard	30	orang	500.000	15.000.000
5 1	02	02	08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi				5.280.000
5 1	02	02	08	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta				5.280.000
				- Biaya Jasa Pembuatan Peta Digital	6	Lembar	880.000	5.280.000
5 1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas				53.680.000
5 1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas dalam Negeri				53.680.000
5 1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				38.680.000
				# Fasilitasi Perjalanan Dinas Forum DAS dalam Daerah				26.200.000
				* Uang Harian				12.000.000
				Forum DAS (2 Orang/3 hari/2 kali)	12	OH	380.000	4.560.000
				Pejabat Eselon III/ Gol. IV (1 orang/3 hari/2 kali)	6	OH	380.000	2.280.000
				Pejabat Eselon IV/Gol. III, Gol II (2 orang/3 hari/2 kali)	12	OH	380.000	4.560.000
				Pejabat UPTD KPH (1 orang/2 hari/2 kali)	4	OH	150.000	600.000
				* Uang Penginapan				14.200.000
				Forum DAS (2 Orang/2 hari/2 kali)	8	OH	650.000	5.200.000
				Pejabat Eselon III/ Gol. IV (1 orang/2 hari/2 kali)	4	OH	950.000	3.800.000
				Pejabat Eselon IV/Gol. III, Gol II (2 orang/2 hari/2 kali)	8	OH	650.000	5.200.000

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	# Perjalanan dinas dalam rangka pembentukan Forum DAS Kab/Kota				12.480.000
	Uang Harian				5.680.000
	Pejabat Eselon III, IV/Gol IV, III, Gol II (4 orang/2 hari/2 kali)	16	OH	380.000	6.080.000
	Pejabat UPTD KPH (1 orang/2 hari/2 kali)	4	OH	150.000	600.000
	Uang Penginapan				5.800.000
	Pejabat Eselon IV/Gol III, Gol II (3 orang/1 hari/2 kali)	6	OH	650.000	3.900.000
	Pejabat Eselon III/Gol IV (1 orang/1 hari/2 kali)	2	OH	950.000	1.900.000
5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				15.000.000
	Pertemuan dalam Rangka Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS				15.000.000
	Penggantian Transport peserta Rapat/pertemuan di luar kantor Fullday/Halfday (Non PNS)	100	orang	150.000	15.000.000
					JUMLAH
					100.000.000

Padang, Januari 2023
 KPA BIDANG PDAS RHL

BAMBANG SUYONO, S.Hut, MM.
 NIP 19720907 199303 1 022